



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK 3203176004940007, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Alfireza Setiawan, S.H. & Agung Nugraha, S.H., M.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advocate & Legal Consultant Alfireza & Partners yang berkantor di Gang Mawar No.37 Jalan Mangunsarkoro, Gang Mawar No.37, Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada email adv.alfireza@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 22/SK.G/MAS/II/2025 tanggal 14 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 267/427/RSK/2025/PA.Cjr, tanggal 21 Januari 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK 3275012906910017, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxx, K elurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada Hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2018, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/052/I/2018, tanggal 15 Januari 2018;
2. Bahwa Penggugat setelah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di Xxxxx Kabupaten / xxxx xxxxxx dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana Layaknya suami istri dan Kurang lebih sejak Bulan Maret 2024, Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehari-hari;
4. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat, yaitu adanya pihak ketiga, dimana Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang berakibat nafkah, untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari menjadi tidak terpenuhi;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada Bulan Mei 2024, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pisah rumah, yang sampai saat ini sudah berjalan selama 7 (Tujuh) bulan;
6. Bahwa Penggugat sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Tergugat, walaupun dipertahankan tidak akan

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Cjr



membawa kemaslahatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Terhadap Tergugat, dimana antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak 1(satu) Ba'in Shugra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka perkara Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Cjr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 21 Januari 2025 dinyatakan selesai karena dicabut Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dicabut oleh Penggugat, namun karena telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin,

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Agus Alwi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Muslimin, M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Agus Alwi, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	32.500,00
3. PNB	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	212.500,00

(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 427/Pdt.G/2025/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)